



Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (Tpid) Kota Denpasar Tahun 2024

Julian Dinar Rajati Mulya *

I Dewa Ayu Putri Wirantari

Ida Ayu Githa Girindra

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: * rajatidhinar@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the inflation control program by the Regional Inflation Control Team (TPID) of Denpasar City in 2024. The method used is descriptive qualitative with an evaluation approach according to William N. Dunn. Data was collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed based on six evaluation indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results indicate that the TPID has implemented programs such as affordable markets, food bazaars, and routine price monitoring, but these efforts have not yet been fully optimized. There are still challenges in disseminating information and enhancing public understanding of TPID programs. Recommendations for improvement include strengthening inter-agency coordination, enhancing budget efficiency and transparency, and developing an online-based information system. Overall, the TPID has made a positive contribution to inflation control in Denpasar, but improvements are needed in public outreach and participation to ensure programs are more targeted and have a broader impact.

Keywords: Policy Evaluation, inflation, government, regional inflation control team (TPID) Denpasar City

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar tahun 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan evaluasi menurut William N. Dunn. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis berdasarkan enam indikator evaluasi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil menunjukkan bahwa TPID telah menjalankan program seperti pasar murah, bazar pangan, dan monitoring harga secara rutin, namun belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kendala dalam penyebaran informasi dan pemahaman masyarakat terhadap program TPID. Rekomendasi peningkatan mencakup penguatan koordinasi antarinstansi, efisiensi dan transparansi anggaran, serta pengembangan sistem informasi berbasis online. Secara keseluruhan, TPID berkontribusi positif dalam pengendalian inflasi di Denpasar, namun perlu peningkatan dalam sosialisasi dan partisipasi publik agar program lebih tepat sasaran dan berdampak luas.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Inflasi, Pemerintah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar



I. Pendahuluan

Pemerintah merupakan lembaga negara yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam pemberian layanan kepada warga atau masyarakat yang mencakup segala sektor termasuk juga pembangunan, kesehatan, terlebih lagi ekonomi. Keban dalam Pemuka (2014) berpendapat bahwasanya dalam lingkup administrasi publik, pemerintah atau pemegang birokrasi adalah pihak yang memiliki peran sentral dalam kekuasaan yang dimana pemerintah berperan aktif dan selalu berinovatif terkait ide-ide pelayanan dalam mengatur atau mengambil tindakan dan inisiatif, yang mereka anggap benar dan baik untuk masyarakat. Peran pemerintah juga mencakup pengendalian pembangunan ekonomi negara yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan serta kualitas hidup warga negara yang bagus. Pembangunan dan keselarasan ekonomi

di suatu negara sangat perlu dilakukan dan menjadi hal yang penting untuk direalisasikan karena selain untuk menjadikan masyarakat yang makmur sejahtera dan memiliki kehidupan yang aman, pertumbuhan ekonomi negara yang stabil juga menjadi salah satu aspek pendukung suksesnya pembangunan ekonomi negara tersebut. Akan tetapi dalam proses pembangunan ekonomi, seringkali muncul berbagai problematika dan hambatan yang salah satunya adalah inflasi yang merupakan persoalan yang sudah pasti dialami oleh suatu negara, dan hal tersebut bisa dialami oleh negara mana saja baik itu negara berkembang ataupun negara maju. Seorang ahli yang bernama Pemuka (2014) menyatakan bahwasanya dalam perekonomian suatu negara, pemerintah memiliki peran atau bertanggungjawab dalam menciptakan sebuah kebijakan yang dapat berfungsi untuk mengatur, memperbaiki, dan bersifat menyeluruh di segala sektor terlebih lagi kepada aktivitas ekonomi, baik dari sektor pemerintah maupun swasta.

Maka dengan demikian, kesuksesan pembangunan dalam suatu negara sangat bergantung pada peran serta kinerja pemerintah dalam mengatur negara, mencakup juga dalam bidang ekonomi. Mengendalikan pergerakan dan tingkat inflasi merupakan aspek penting dalam hal ekonomi makro. Mengatasi inflasi secara efektif sangat merupakan hal yang krusial karena pengaruh atau imbas dari inflasi bisa sangat mempengaruhi kemakmuran masyarakat. Ketika inflasi menduduki peringkat tinggi dan tidak stabilnya suatu kondisi ekonomi, hal ini bisa menurunkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian inflasi harus menjadi tanggung jawab bersama antara bank sentral dan pemerintah. Kerja sama antara keduanya sangat diperlukan untuk menekan inflasi ke tingkat yang rendah dan stabil, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata. Selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian menyatakan asumsinya dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara online yang bertempat di Ruang Tanjung Pesona Kantor Gubernur Kepulauan Babel, pada hari Selasa (30/8/2022), beliau mengatakan bahwa dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan merupakan hal yang sangat perlu bagi kita semua untuk melakukan segala cara dan yang solutif dan antisipatif dalam menghadapi inflasi di Negara Indonesia. Proses pemulihan ekonomi dan pengendalian inflasi ini tidak hanya sebagai tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga menjadi kewajiban atau aspek akuntabilitas dan memerlukan kontribusi secara aktif dari pemerintah daerah yang memainkan peranan penting pada upaya pemulihan perekonomian serta pengendalian inflasi Indonesia saat ini. Pemerintah daerah menempati posisi yang strategis pada percepatan serta optimalisasi efektivitas untuk pemulihan ekonomi dengan keunggulan berupa pemahaman komprehensif terhadap struktur ekonomi lokal, karakteristik demografis, serta kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Indikator kunci yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk menstimulasi pemulihan ekonomi tercermin dalam formulasi kebijakan yang memang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD. Melalui pendekatan yang holistik dan terkoordinasi antara pemegang birokrasi sentral dan juga pemerintah daerah yang memiliki tujuan untuk pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keunikan dan potensi masing-masing daerah dalam kontribusinya terhadap perekonomian nasional (Saefulloh et al., 2023).

Maka dari itu tidak hanya pemerintah, masyarakat dan sektor bisnis juga memainkan peran krusial dalam proses pengendalian inflasi sekaligus pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah mengadopsi berbagai kebijakan fiskal dan moneter untuk memberikan kemudahan, yang diharapkan dapat diterima dengan baik oleh rakyat serta pelaku usaha. Hal ini bertujuan agar mereka dapat sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mengatasi kontraksi ekonomi yang dialami Indonesia. Salah satu tindakan strategis dari Pemerintah adalah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk mendukung suatu upaya pemulihan perekonomian nasional, dengan tujuan akhir memulihkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini meliputi upaya untuk meningkatkan konsumsi domestik, mendorong aktivitas pada dunia usaha dan juga memastikan agar stabilitas ekonomi dan mengarahkan ekspansi moneter yang terukur. Ketiga aspek kebijakan ini akan diimplementasikan secara terkoordinasi oleh berbagai pihak yang memang bertanggung jawab penuh atas kebijakan fiskal dan juga moneter, serta institusi terkait lainnya. Suatu keadaan penurunan ekonomi atau Inflasi yang terjadi di daerah menjadi penyumbang inflasi senilai 77,51 persen terhadap inflasi nasional, fenomena inflasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor kejutan atau *shocks*. Terjadinya faktor kejutan tersebut bisa berupa rintangan yang dialami oleh pihak

produksi dalam suatu daerah yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, musim kemarau atau musim hujan yang berkepanjangan sehingga menjadi penyebab utama dalam adanya inflasi yang terjadi pada kelompok bahan makanan. Tidak hanya itu, faktor kejutan atau *shocks* juga bisa berupa naiknya harga Bahan Bakar Minyak atau BBM dalam suatu negara sehingga menjadi penyumbang atau penyebab dalam terjadinya inflasi dalam kelompok kebutuhan tersebut yang tentunya menjadi penyumbang imbas negatif atau buruk pada kelompok-kelompok komoditas yang harganya telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, dengan adanya keadaan inflasi tersebut jika hanya ditanggapi oleh kebijakan moneter yang dihasilkan oleh pemerintah, maka hal tersebut belum cukup untuk mengatasi fenomena penurunan harga tersebut (Ismail, 2020). Dalam upaya mengendalikan inflasi atau mengatasi tingkat inflasi yang tidak terkendali, sangat perlu untuk mendapat bantuan atau dukungan dari pemerintah untuk menurunkan inflasi agar dapat menuju tingkat atau skor yang stabil atau seimbang. Hal ini sangat perlu bantuan dari pemerintah karena pemerintah merupakan salah satu pihak yang mempunyai kendali atau kekuasaan untuk menanggulangi gangguan atau kejutan (*shocks*) dari sisi penawaran (*supply*), termasuk juga harga pangan yang mengalami gejolak atau kenaikan drastis.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pengendalian inflasi sangat membutuhkan komunikasi yang efektif dan kerjasama yang kuat antara pihak Bank Indonesia dengan pihak pemerintah baik di lingkungan sentral maupun daerah. Maka dengan adanya upaya dan koordinasi dalam pengendalian inflasi tersebut, pihak pemerintah pusat dan Bank Indonesia memperkuat upaya tersebut dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPI) pada tahun 2005 yang di dasari pada Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Keuangan No.88/KMK.02/2005 dan Gubernur Bank Indonesia No.7/9/KEP.GBI/2005 yang disusun oleh instansi pemerintah dan Bank Indonesia. Lalu dengan seiring berkembangnya kebijakan tersebut, pengadaaan Tim Pengendali Inflasi diluaskan cakupan tanggung jawabnya menjadi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Yang sebelumnya Tim Pengendali Inflasi di Indonesia hanya ada di tingkat pusat, selanjutnya dikembangkan menjadi Tim Pengendalian Inflasi yang mencakup di beberapa daerah yang terbentuk pada tahun 2008.

Pada rentang tahun 2008 sampai tahun 2010, pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berkembang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya 95 TPID yang sudah terbentuk di Indonesia pada bulan April tahun 2013 namun dengan nama-nama yang berbeda. Maka dari itu pemegang birokrasi di lingkup daerah melakukan penguatan dasar hukum pembentukan TPID yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan dan anggaran daerah. Lalu selanjutnya pada tanggal 2 April 2013 melalui Kementrian Dalam Negeri, pemerintah pusat mengedarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang "Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah" yang diinformasikan kepada setiap Kepala Daerah di Indonesia seperti Walikota, Bupati dan Gubernur mengenai pedoman dalam upaya implementasi dan juga media komunikasi dari TPID terkait penjagaan stabilitas harga bahan serta dalam mewujudkanke kompakan struktur kelembagaan TPID secara resmi (Utara, 2014). Tidak hanya ditujukan sebagai pedoman, dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut juga berisikan mengenai undang-undang atau pasal yang memberitahukan bahwa seluruh Kepala Daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia agar segera membentuk TPID sebagai wadah koordinasi. Dalam lingkup domestik khususnya di Provinsi Bali, pengendalian dan pengelolaan angka inflasi menjadi tujuan sekaligus tanggung jawab utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2008 awal, provinsi Bali mengalami laju inflasi yang mencapai peringkat yang cukup tinggi yaitu 2,50 % sedangkan inflasi nasional ada pada angka 1,77%. Kondisi seperti ini yang menjadi urgensi Pemerintah Provinsi Bali dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III (Bali & Nusra) untuk segera membentuk sebuah institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai media atau wadah koordinasi pemerintah dalam memantau, mengelola dan mengendalikan inflasi yang disebut sebagai Tim Koordinasi Pemantauan Inflasi Daerah (TKPID).

Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) adapun rekapan terkait inflasi bulanan Kota Denpasar tahun 2023 dan tahun 2024. Perlu diketahui bahwa dalam penulisan penelitian ini menggunakan tahun yang memiliki rekapitulasi terbaru dan terlengkap dari bulan januari sampai bulan desember dan tahun 2024 merupakan tahun yang memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya menggunakan rekapitulasi data pada tahun 2023 yang digunakan sebagai tahun perbandingan perkembangan inflasi dari tahun 2023

dan 2024 yang pada akhirnya dapat melihat perbedaan dan perkembangan inflasi tahunan Kota Denpasar sebagai wujud hasil dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Denpasar (TPID). Berikut adalah perbandingan inflasi bulanan Kota Denpasar tahun 2023 dan 2024:

Tabel 1. Rekapitulasi Perbandingan Inflasi Bulanan Kota Denpasar Dan Nasional Tahun 2023-2024

Tahun 2023	Tahun 2023			Tahun 2024		
	Month to month	Year to Date	To Year	Month to month	Year To Date	Year to Year
Januari	0,62 %	0,62 %	5,95%	0,08%	0,08 %	2,12%
Februari	0,04 %	0,65 %	6,37%	0,65%	0,57 %	2,72%
Maret	0,03 %	0,68 %	5,50%	0,87%	1,44 %	3,43 %
April	0,06 %	0,74 %	4,50%	0,53%	1,98 %	3,94 %
Mei	0,34 %	1,09 %	4,09%	0,05%	2,03%	3,52 %
Juni	-0,04 %	1,14 %	3,08%	0,32%	1,71 %	3,18 %
Juli	0,36 %	1,37 %	2,66%	0,16%	1,87 %	3,04 %
Agustus	0,21 %	1,58 %	2,91%	0,26%	2,14 %	2,95 %
September	-0,3 %	1,56 %	2,31%	0,26%	2,14%	2,95 %
Oktober	0,18 %	1,86 %	2,64%	0,10%	2,30 %	2,96 %
November	0,33 %	2,04%	2,51%	0,19%	2,49%	2,82 %
Desember	0,49 %	2,54%	2,54%	0,19%	2,69 %	2,69%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Dari uraian tabel diatas menunjukkan angka-angka perbandingan inflasi tahunan Kota Denpasar pada tahun 2023 dan tahun 2024. Digunakan tahun 2023 dan tahun 2024 karena dengan melihat angka inflasi di kedua tahun tersebut dianggap dapat mengetahui hasil kerja dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar yang kemudian dapat dilakukan sebuah evaluasi program atau evaluasi program. Tabel perbandingan inflasi tahunan Kota Denpasar tahun 2023 dan tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan yang di dalamnya meliputi hal kenaikan dan penurunan harga barang serta jasa di pasar. Pada perhitungan perbandingan inflasi tahunan tersebut menggunakan presentasi perubahan indeks harga konsumen (IHK) *month to month* (m-t-m), *year to date* (y-t-d), *year to year* (y-t-y). Dapat dijelaskan mengenai inflasi m-t-m sebagai perbandingan nilai indeks harga konsumen pada bulan yang diamati dengan bulan sebelumnya. Seperti contoh akan mengamati inflasi bulan juli maka diteliti dan dibandingkan dengan bulan juni yang merupakan bulan sebelum bulan juli. Selanjutnya perbandingan Inflasi y-t-d merupakan metode perbandingan indeks harga konsumen yang dihitung dari awal tahun dengan bulan atau waktu tertentu pada tahun yang sama dan telah berjalan. Seperti contoh akan menghitung bulan maret tahun 2024 maka dibandingkan dengan bulan januari tahun 2024. Selanjutnya yaitu y-t-y yang merupakan metode perbandingan nilai indeks harga konsumen yang dihitung pada bulan yang diamati dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Seperti contoh akan menghitung angka harga konsumen pada bulan September tahun 2024 maka dibandingkan dengan September tahun 2023.

Pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa angka inflasi masih tergolong tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dengan presentase inflasi di masing-masing perhitungan month to month dan year on year di tahun tersebut. Secara jelasnya perhitungan infalsi bulan ke bulan atau month to month, bulan januari merupakan bulan yang memiliki presentase inflasi tertinggi pertama di tahun 2023 yang mencapai angka 0,62%. Adapun beberapa penyumbang inflasi di bulan januari tersebut yaitu Inflasi (m to m) yang tercatat di Kota Denpasar pada bulan Januari 2023 ditunjukkan dengan peningkatan indeks pada tujuh kelompok pengeluaran yaitu kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) sebesar 1,77 persen; kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) sebesar 1,27 persen; kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya) sebesar 0,77 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) sebesar 0,75 persen; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar

rumah tangga) sebesar 0,28 persen; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) sebesar 0,14 persen; dan kelompok V (kesehatan) sebesar 0,01 persen.

Komoditas yang tercatat mengalami peningkatan harga atau memberikan andil/sumbangan inflasi pada bulan Januari 2023 antara lain beras, cabai rawit, cabai merah, sewa rumah, rokok putih, mangga, canang sari, rokok kretek filter, bawang merah, emas perhiasan. Sedangkan komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga atau menahan laju inflasi di Kota Denpasar antara lain bensin, sawi hijau, sabun mandi cair, jeruk, sawi putih/petsai, semangka, melon, baju muslim pria, salak, dan kemeja panjang katun pria. Selanjutnya pada tahun 2024 angka inflasi di Kota Denpasar sudah dapat dikatakan mengalami penurunan namun masih dalam perhatian. Hal tersebut dikarenakan presentase inflasi pada tahun 2024 lebih rendah dibanding presentase inflasi di tahun 2023 namun masih ada beberapa bulan yang mengalami kenaikan inflasi yang masih tinggi. Bulan maret merupakan bulan yang menempati presentase inflasi tertinggi pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,87%. Adapun beberapa kelompok kebutuhan yang menjadi penyumbang inflasi pada bulan tersebut yaitu Makanan, Minuman, dan Tembakau senilai 1,65%, Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,22%, Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,01%, Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga senilai 0,48%, Kesehatan sebesar 0,02%, Transportasi senilai 0,67%, Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,03%, Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,67%, Pendidikan sebesar 0,04%, Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 1,97%, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya senilai 0,76%. Dari tabel perbandingan inflasi tahun 2023 dan 2024, dapat dilihat bahwa tingkat inflasi di beberapa negara mulai menurun, meskipun masih ada yang mengalami kenaikan akibat faktor internal seperti gangguan rantai pasok dan permintaan domestik yang tinggi. Negara dengan kebijakan ekonomi yang lebih ketat cenderung berhasil menurunkan inflasi lebih cepat dibanding negara yang masih menghadapi tantangan ekonomi besar. Selain itu, penyesuaian harga komoditas global dan kebijakan fiskal juga berperan dalam perubahan angka inflasi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, tabel ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan inflasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam dua tahun terakhir.

Pada 25 Maret 2008, Bank Indonesia mengadakan rapat konferensi dengan sembilan (9) lembaga atau instansi yang meliputi Dinas Perdagangan dan , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, Bulog Bali, Badan Pusat Statistik serta Dinas Perhubungan dan Komunikasi. Pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai pembentukan tim pemantauan inflasi yang awalnya disebut dengan Tim Koordinasi Pemantauan Inflasi Daerah. Dalam pertemuan tersebut tercatat beberapa kesepakatan yaitu akan dilaksanakan rangkaian rapat atau pertemuan koordinasi pada waktu yang dijadwalkan, dibentuknya payung hukum yang lebih jelas terkait pembentukan keanggotaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar dan persetujuan-persetujuan terkait penambahan anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dapat membantu keberlangsungan tim tersebut serta agar dapat lebih mudah dalam mencapai tujuan dibentuknya TPID yaitu untuk menyatukan anggota dalam pengawasan dan pengendalian mata uang di Kota Denpasar guna mencapai tujuan pertumbuhan mata uang dan perekonomian Bali pada khususnya dan tanah air secara keseluruhan. Dalam proses selanjutnya, pada tahun 2010 kebutuhan penguatan fasilitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan tuntutan pemangku kepentingan atau penanggungjawab agar TPID dapat lebih berperan secara aktif dalam pengendalian mata uang daerah. Untuk mendukung peningkatan tanggung jawab dan memperlancar proses unifikasi, landasan kelembagaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali telah diletakkan dalam bentuk kontrak, yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Bali No. 531/01-D/HK/2010 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pemantauan Inflasi Daerah (TKPID) Provinsi Bali tanggal 22 April 2010. Setelah disahkannya pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar melalui SK Nomor 188.45/887HK/2018 tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Pada umumnya inflasi merupakan kejadian yang menunjukkan kondisi penawaran dan permintaan tidak seimbang dalam perekonomian nasional. Walaupun ada beberapa jenis inflasi yang diwajibkan terjadi

dalam dunia perekonomian, hal tersebut tentu dapat merusak daya beli masyarakat atau konsumen sehingga menyebabkan kekacauan dalam penyediaan dan penyaluran sumber daya yang dapat menyebabkan ketidakpastian perencanaan ekonomi. Tidak hanya itu, dengan adanya inflasi juga dapat berdampak pada kebijakan finansial dan keuangan di suatu negara yang merupakan komponen yang memiliki peranan penting sehingga dibutuhkan pengelolaan secara khusus dan serius agar dapat menjaga kestabilan harga dan perkembangan atau evolusi ekonomi. Sangat perlu untuk mengetahui betapa penting memiliki pemahaman secara mendalam mengenai inflasi bahwa dalam lingkup ekonomi global, pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan dua komponen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Meningkatnya permintaan pelaku ekonomi yang sangat besar atau melampaui batas penawaran dapat menjadi faktor pendorong terjadinya inflasi, terlebih lagi apabila kebijakan yang diberikan oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi masalah inflasi merupakan hal yang memberikan dampak positif terhadap percepatan ekonomi. Maka dari itu dalam upaya membangun ekonomi yang kuat dan massif diperlukan pencapaian inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tepat bijak dan transparan. Sebagai komponen yang sangat penting apabila pemerintah melakukan evaluasi terhadap suatu program yang telah dibuat, hal ini dikarenakan program yang dibuat pemerintah merupakan salah satu realisasi dari kebijakan yang diterbitkan. Sama halnya dengan evaluasi yang dilakukan pada program pengendalian inflasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Diadakannya evaluasi pada suatu program dapat berfungsi sebagai media atau alat yang digunakan dalam mengukur dan menimbang seberapa jauh efektivitas dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Selain itu evaluasi dilaksanakan agar mencapai kepastian dari tercapainya tujuan dan harapan yang telah ditetapkan terkait pengendalian inflasi daerah.

William Dun mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan yang melakukan sebuah penaksiran atau *appraisal*, menilai atau *assessment* dan memberi skor atau *rating* dan semua kegiatan yang berkaitan dengan kaidah atau sistem yang digunakan dalam proses analisis segala informasi yang berkaitan dengan nilai dan kegunaan dari sebuah kebijakan. Sedangkan Suchman berpendapat bahwa evaluasi merupakan bentuk dari beberapa metode yang berperan sebagai bahan deskripsi, penemuan serta pemberian data dan berita yang memiliki nilai yang berguna untuk mengukur suatu kebijakan atau keputusan. Sama halnya dengan definisi yang disampaikan oleh Stufflebeam bahwa evaluasi merupakan desain atau mekanisme suatu ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan melalui sebuah program yang berfungsi untuk mendapatkan suatu hasil pengukuran yang objektif serta dapat dipastikan terkait validitas tercapainya program yang telah dibuat. Dalam proses menjalankan tanggung jawab dapat dipastikan bahwa pemerintah mempunyai peranan penting dalam merealisasikan program kebijakan yang diberikan kepada masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa program kebijakan yang dibuat dapat memberikan dampak positif dan menjadi komponen solutif terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakat dalam suatu wilayah yang dipimpin. Sama halnya dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang merupakan perwujudan dari program kebijakan pemerintah dalam upaya mengurangi dan mengatasi masalah inflasi di Indonesia dan termasuk juga semua daerah yang ada, maka dengan demikian dilakukannya suatu evaluasi menjadi hal yang sangat diharuskan dan penting dilakukan terhadap program kebijakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar seluruh pihak baik pemerintah dan masyarakat dapat menilai tingkat efektivitas dan kualitas program pemerintah tersebut di Negara Indonesia khususnya Provinsi Bali.

Dengan demikian adapun beberapa permasalahan yang ditemukan dalam uraian latar belakang diatas adalah permasalahan **pertama** yaitu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar belum efektif dalam menjalankan tugas. Hal ini dapat dibuktikan di lapangan dengan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar. Permasalahan **kedua** yaitu, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan serta implementasi program pengendali inflasi daerah secara langsung, mengingat program pengendalian inflasi merupakan program yang memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik evaluasi (Moleong, 2007). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara rinci, mendalam, dan kontekstual, sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Rachmat Kriyantono (2006), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memberikan gambaran rinci tentang realitas sosial dengan mengumpulkan data secara menyeluruh. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih mengutamakan prosedur serta interpretasi dengan berlandaskan teori sebagai acuan dalam mengkaji realitas di lapangan. Metode evaluatif digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program mencapai tujuan yang direncanakan, dengan memperhatikan faktor keberhasilan, partisipasi, manfaat, serta kelayakan program. Evaluasi tidak hanya mengukur pencapaian tujuan, tetapi juga mengidentifikasi perubahan yang tidak direncanakan, serta menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas Program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2024.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung terhadap masyarakat yang terdampak inflasi, khususnya para pedagang dan konsumen pasar di Kota Denpasar, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan TPID seperti Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur, arsip, dan dokumen kebijakan yang relevan guna melengkapi dan menguatkan hasil temuan di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di berbagai lokasi strategis, yaitu Kantor Sekretariat Daerah Kota Denpasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, serta beberapa pasar tradisional di Kota Denpasar, seperti Pasar Nyanggelan, Pasar Kumbasari, Pasar Asoka/Kreneng, dan Pasar Agung Peninjoan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni memilih individu yang dianggap memahami dan memiliki informasi relevan dengan tujuan penelitian, seperti pejabat pemerintah, pedagang, serta konsumen pasar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi visual maupun tertulis. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi panduan wawancara, lembar observasi, dan daftar dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan secara naratif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn, seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, pemerataan, dan ketepatan.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria validitas kualitatif yaitu credibility (melalui triangulasi sumber), transferability (dengan penyajian data rinci), dependability (dengan pengamatan langsung), dan confirmability (dengan sinkronisasi proses dan hasil penelitian). Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif dan objektif tentang implementasi program TPID dalam mengendalikan inflasi di Kota Denpasar.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Temuan Penelitian

Implementasi program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar dapat dianalisis melalui enam aspek evaluasi kebijakan publik, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari segi efektivitas, TPID Kota Denpasar telah melaksanakan berbagai program yang mengacu pada sembilan prinsip atau upaya pengendalian inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai dinas yang saling berkoordinasi, seperti dalam kegiatan monitoring harga pasar, pelaksanaan pasar murah, serta bazar

pangan. Namun demikian, meskipun dinas-dinas terkait menyatakan bahwa program telah direalisasikan, masih terdapat kesenjangan informasi di masyarakat. Sebagian masyarakat pasar mengaku tidak mengetahui keberadaan TPID secara spesifik, dan hanya menyadari adanya kegiatan pengecekan harga yang dilakukan pemerintah pada waktu-waktu tertentu saja.

Dari aspek efisiensi, anggaran pelaksanaan program pengendalian inflasi disusun satu tahun sebelumnya dan diklaim telah digunakan secara optimal. Menurut penyelenggara kegiatan, realisasi anggaran telah sesuai dengan perencanaan, bahkan dana yang tidak terpakai dikembalikan ke pemerintah pusat. Efisiensi ini juga tercermin dari kerja sama yang baik antar anggota TPID, yang ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam rapat koordinasi serta kegiatan lapangan. Selain itu, mekanisme pertanggungjawaban pun berjalan sistematis, di mana setiap anggota menyusun Laporan atau Surat Pertanggungjawaban (LPJ/SPJ) yang diserahkan secara berjenjang hingga ke koordinator TPID Kota Denpasar.

Berkaitan dengan kecukupan, TPID Kota Denpasar dinilai telah memenuhi indikator yang diperlukan meskipun belum secara penuh atau mencapai 100 persen. Sementara itu, dari aspek pemerataan, kegiatan TPID sudah dirancang untuk menjangkau seluruh kelurahan secara adil, baik dari segi lokasi maupun kelompok masyarakat sasaran. Meski demikian, kendala masih ditemukan dalam penyebarluasan informasi program monitoring harga pasar yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, khususnya pelaku pasar.

Dari sisi responsivitas, TPID Kota Denpasar telah menunjukkan upaya yang nyata dalam merespons kebutuhan masyarakat, terbukti dengan harga komoditas pokok yang relatif stabil dan lebih terjangkau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga inflasi di Kota Denpasar dapat ditekan. Terakhir, berdasarkan indikator ketepatan, kebijakan dan program yang dilaksanakan TPID terbukti tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, terutama dalam menjaga kestabilan inflasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, secara keseluruhan, TPID Kota Denpasar telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama dalam hal komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil dari analisis Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2024 yang dikaji berdasarkan pada enam (6) indikator evaluasi menurut William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

3.2.1 Efektivitas

Merupakan indikator yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari suatu metode atau alternatif yang dilakukan. Indikator tersebut membahas apakah metode yang digunakan dapat mencapai tujuan yang direncanakan dengan apapun upaya yang dilakukan. Adapun keterkaitan indikator efektivitas dengan hasil temuan dari evaluasi yang dilakukan pada program pengendali inflasi daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Pada dasarnya, seperti yang tercantum pada keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/74/HK/2024 tentang pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Denpasar menerangkan bahwa secara umum tugas atau hal tujuan dibentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah adalah pemerintah bertugas untuk mengendalikan angka inflasi daerah. Maka dengan rencana atau upaya tersebut pemerintah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah yang melakukan beberapa program-program kegiatan didalamnya yang dilakukan untuk mengendalikan angka inflasi di daerah. Tim Pengendali Inflasi Daerah menerapkan 9 prinsip atau 9 upaya yang kemudian dijadikan bahan acuan sebagai implementasi program-program yang dilakukan guna mengendalikan angka inflasi di daerah khususnya Kota Denpasar. 9 upaya pengendalian inflasi tersebut terdiri dari melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, melaksanakan pencanangan gerakan menanam,

melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, realisasi belanja wajib perlindungan sosial dan memberikan bantuan transportasi dari APBD. Dengan adanya 9 upaya tersebut dibagi menjadi beberapa kegiatan atau program sekaligus dinas-dinas yang menangani kegiatan penanganan inflasi yang dilaksanakan harian yaitu:

- a. Sekretariat Daerah Kota Denpasar: Rapat koordinasi/teknis TPID Kota Denpasar dan monitoring Tim Pengendali Inflasi Daerah ke bulog, pasar dan distributor.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar: Operasi pasar/pasar murah dalam rangka menyambut hari besar keagamaan nasional (HBKN) hari raya galungan & kuningan, pemantauan harga di 4 pasar yaitu di pasar badung, pasar kereng, pasar nyanggelan dan pasar agung peninjoan dan kegiatan rutin money informasi harga bahan makanan pokok dan penting lainnya di pasar tradisional setiap hari senin dan kamis.
- c. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar: Bazar pangan, pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, pengadaan cadangan beras, gerakan menanam dan pengembangan SIPAPA ONLINE.

Maka dengan dilakukannya program-program pengendalian inflasi daerah oleh dinas yang menjadi anggota pelaksana harian Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar tersebut dapat menunjukkan bahwa Tim Pengendali Kota Denpasar melakukan program secara nyata dalam upaya pengendalian inflasi. Namun ada beberapa program dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar yang masyarakat pedagang pasar masih belum mengetahui secara keseluruhan yaitu monitoring harga pasar disetiap senin dan kamis. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar telah mencapai indikator efektivitas namun belum optimal.

3.2.2 Efisiensi

Indikator efisiensi menjelaskan mengenai jumlah usaha yang diperlukan untuk melihat hasil dari tingkat suatu efektivitas. Dalam penjelasan indikator efisiensi biasanya menjelaskan mengenai seberapa efektif biaya atau dana yang digunakan dalam melaksanakan suatu produk layanan kebijakan. Adapun keterkaitan indikator efisiensi dengan hasil temuan dari evaluasi yang dilakukan di program pengendalian inflasi daerah Kota Denpasar tahun 2024 yaitu dalam perancangan anggaran yang digunakan untuk menjalankan program kegiatan penanganan inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB) setahun sebelum periode implementasi program dijalankan. Pada tahun 2024 terhitung anggaran biaya yang digunakan sebesar Rp 3.575.742.000 sesuai dengan pernyataan dari Sekretariat Daerah selaku koordinator, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar selaku anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Denpasar, realisasi dari anggaran yang digunakan sudah efisien karena pelaksanaan program sudah mengikuti anggaran yang dibuat dan apabila ada sisa dari penggunaan program, dana anggaran tersebut dikembalikan ke pusat. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar melaksanakan beberapa kerjasama yang ditunjukkan dengan sistem pertanggungjawaban yang dilakukan oleh masing-masing anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar berupa kehadiran staff pada saat berlangsungnya kegiatan penanganan inflasi daerah, koordinasi dan pembuatan dokumen pertanggungjawaban. Sistem pertanggungjawaban tersebut meliputi sekretariat daerah Kota Denpasar yang membuat laporan setiap tiga bulan sekali atau pembuatan laporan dalam rentang triwulan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar yang melaporkan setiap hari senin dan kamis dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar yang membuat laporan kegiatan yang disebut sebagai (SPJ/LPJ) Surat Pertanggungjawaban atau Laporan Pertanggungjawaban. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan penanganan inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar sudah mencapai kategori efisiensi.

3.2.3 Kecukupan

Dalam konsep evaluasi menurut Wiliam N Dunn, indikator kecukupan membahas mengenai suatu hal yang berkaitan dengan penilaian seberapa jauh suatu program atau kebijakan telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun penilaian tingkat kecukupan dari program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar yaitu dengan dilakukannya program kegiatan pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar dapat menangani masalah inflasi. Hal tersebut dibuktikan dengan presentase target inflasi nasional yaitu di angka 3 dari perhitungan 2 sampai 4 persen (%). Dipaparkan pula bahwa presentase inflasi di Kota Denpasar dapat dikatakan tidak tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu juga dibuktikan dengan dibantunya proses penurunan harga bahan pokok yang sedang mengalami kenaikan harga yang dimana bantuan tersebut diberikan pemerintah yang bekerjasama dengan distributor untuk memberikan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Namun ditengah upaya tersebut terdapat beberapa kendala berupa kurangnya pemahaman dan informasi di kalangan masyarakat mengenai keberadaan program-program tersebut. Banyak warga yang belum mengetahui bahwa bazar pangan dan pasar murah diselenggarakan untuk membantu menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau. Menyikapi hal ini, pemerintah sebagai pengelola TPID Kota Denpasar memberikan solusi strategis dengan meningkatkan pemberian informasi dan sosialisasi yang lebih masif dan menyeluruh agar seluruh masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan program-program tersebut secara optimal, sehingga tujuan pengendalian inflasi dapat tercapai dengan lebih efektif. Maka dengan hal tersebut dapat dikategorikan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar sudah baik dalam kategorisasi kecukupan namun belum optimal.

3.2.4 Perataan

Dalam teori evaluasi menurut William N Dunn, indikator pemerataan merujuk pada ukuran atau prinsip yang digunakan untuk menilai sejauh mana hasil dari suatu program atau kebijakan didistribusikan secara adil dan merata di antara berbagai kelompok masyarakat. Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan aksesibilitas kebutuhan pokok bagi masyarakat, sangat perlu dilakukan penilaian terkait sejauh mana program-program yang dilaksanakan, seperti bazar pangan dan pasar murah, dapat memberikan manfaat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pemerataan yang dilakukan pada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar dibuktikan dengan dilakukannya program secara rutin di tiap-tiap kelurahan di Kota Denpasar. Dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi tidak ada jadwal tertentu namun diupayakan dilakukan secara adil di setiap daerah. Seperti contoh apabila alam suatu daerah atau kelurahan dilakukan kegiatan pasar murah sebanyak dua kali, maka di daerah lain pun dilaksanakan dua kali. Dalam pelaksanaan bazar pangan juga dianggap merata karena sasaran yang ditentukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar diarahkan atau dituju ke seluruh masyarakat dalam wilayah tersebut. Namun pemerataan yang dirasakan oleh masyarakat pedagang pasar belum semua merasakan karena belum semua merasakan karena Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar yang terjun ke pasar melakukan pengecekan hanya pada perwakilan pedagang atau salah satu pedagang dan disaksikan atau diketahui tidak melakukan pengecekan harga setiap hari melainkan pada waktu-waktu tertentu saja seperti pada perayaan dan hari besar. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar telah memenuhi kriteria pemerataan namun belum optimal.

3.2.5 Responsivitas

Indikator responsivitas dalam teori evaluasi menurut William N. Dunn adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu program atau kebijakan mampu menanggapi kebutuhan, perubahan situasi, dan masukan dari masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar melaksanakan program kegiatan secara rutin setiap bulan-bulan atau periode tertentu menyesuaikan dengan agenda program yang dimana hal tersebut telah membuahkan hasil yang positif. Hasil positif tersebut berupa angka inflasi pada periode tahun-tahun terakhir telah terkendali atau dapat dikatakan sudah tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah atau Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar telah

mengusahakan mengimplementasikan program kegiatan pengendalian inflasi seperti pemantauan harga, pasar murah dan bazar pangan dilakukan secara merata dan dianggap tidak memerlukan inovasi, tambahan atau perubahan program yang dilakukan melainkan cukup dengan menekuni asas atau prinsip 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif) dan yang kemudian turun menjadi 9 Upaya Pengendalian Inflasi Oleh Tim Pengendali Inflasi. Maka dengan hal tersebut, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar dapat dikatakan sudah optimal dalam hal responsivitas.

3.2.6 Ketepatan

Indikator ketepatan dalam teori evaluasi menurut William N. Dunn merujuk pada ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program atau kebijakan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan akurat dan sesuai dengan harapan. Dengan menggunakan indikator ini, evaluasi yang dilakukan pada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar dapat mengetahui apakah hasil yang diperoleh dari dilaksanakannya program tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar dapat dikatakan telah memenuhi kriteria ketepatan karena program atau kebijakan yang memang dibuat sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah mampu menghasilkan nilai guna dan dampak positif bagi masyarakat. Tidak hanya menguntungkan ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi perkembangan ekonomi negara. Program yang menjadi prioritas presiden di Indonesia, Tim Pengendali Inflasi Daerah, dianggap memiliki manfaat jangka panjang. Kegunaan dan keuntungan jangka panjang termasuk kelangsungan perdagangan pasar, perekonomian masyarakat, tercapainya target inflasi tahunan negara, dan membantu petani dengan distribusi yang lancar. Selain itu, ada keadilan dalam distribusi dan penjualan bahan baku atau bahan pokok seperti beras, bawang, cabai, dan komoditas lainnya.

3.3 Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2024 berjalan cukup baik namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari analisa yang dilakukan berdasarkan enam indikator pengukuran evaluasi menurut William N Dunn yaitu indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Maka dari itu adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:

Pertama, memperkuat kerjasama. Untuk mencapai hasil yang optimal, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar perlu memperkuat sinergi antarinstansi, seperti dinas yang ada di lingkungan Kota Denpasar, Bank Indonesia, Bulog, dan pelaku distribusi. Dengan koordinasi yang lebih solid, langkah-langkah pengendalian harga bisa diterapkan secara lebih tepat dan berdampak nyata terhadap penurunan inflasi serta diharapkan dapat mempertahankan prinsip prioritas yang menjadi dasar penerapan program kegiatan pengendalian inflasi serta mempertahankan rutinitas yang dilakukan pada program kegiatan pengendalian inflasi Kota Denpasar.

Kedua, penghematan dan transparansi anggaran. Diperlukan pengelolaan anggaran yang hemat, tepat guna, dan transparan. Alokasi biaya harus difokuskan pada program-program prioritas yang memberikan dampak langsung terhadap pengendalian inflasi, seperti penyelenggaraan pasar murah, subsidi distribusi, atau penyediaan data harga yang akurat. Selain itu, penerapan sistem pertanggungjawaban keuangan yang disiplin dan akuntabel juga sangat penting untuk menjamin bahwa setiap penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai aturan. Dengan efisiensi anggaran dan tata kelola yang tertib, TPID tidak hanya menghindari pemborosan, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dijalankan.

Ketiga, peningkatan sistem pelayanan dan sistem informasi berbasis data atau online. Ketanggapan TPID dalam menghadapi kenaikan harga harus terus ditingkatkan. Sistem pelaporan cepat berbasis data serta partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kondisi pasar dapat mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang responsif terhadap situasi aktual. Selain itu, sistem informasi berbasis data dapat lebih berguna dalam menjangkau masyarakat luas.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar berjalan cukup baik namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari analisa pada lima indikator evaluasi menurut William N Dunn yaitu:

1. Indikator efektivitas

Indikator efektivitas dalam evaluasi program pengendalian inflasi melalui tim pengendali inflasi daerah (TPID) Kota Denpasar tahun 2024 dapat dikatakan optimal dalam pelaksanaan program-program kegiatan yang menjadi upaya dalam pengendalian inflasi di Kota Denpasar seperti monitoring harga ke dinas dan pihak terkait, rapat koordinasi pengembangan inflasi, pelaksanaan operasi pasar, pasar murah, bazaar pangan dan pengembangan website SIPAPA ONLINE. Namun belum sepenuhnya optimal dikarenakan program kegiatan monitoring harga pasar yang dilakukan harian disaksikan oleh pisak pedagang pasar bahwa monitoring atau pengecekan harga pasar dilakukan pada saat-saat tertentu saja atau pada saat hari besar saja.

2. Indikator Efisiensi

Pengukuran efisiensi pada Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar sudah mencapai kategori efisiensi yang optimal. Hal tersebut dikarenakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar telah sesuai dengan aspek-aspek penilaian indikator efisiensi tersebut.

3. Indikator Kecukupan

Dalam penilaian kecukupan pada Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar belum dapat dikatakan optimal. Hal tersebut dikarenakan pada satu sisi ditengah upaya pengendalian inflasi, masih terdapat masyarakat yang masih belum mengetahui adanya program kegiatan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar.

4. Indikator Perataan

Penilaian perataan dalam Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar tahun 2024 dapat dikatakan telah memenuhi indikator perataan namun belum optimal. Dapat dikatakan optimal dikarenakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar telah membuat kegiatan secara rutin di masing-masing daerah atau kelurahan di Kota Denpasar secara rutin dan sama perhitungannya namun belum optimal karena masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum merasakan bahkan belum mengetahui adanya kebijakan tersebut.

5. Indikator Responsivitas

Pengukuran indikator responsivitas dalam Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Kota Denpasar Tahun 2024 dapat dikatakan telah optimal karena kebijakan yang berupa program kegiatan penanggulangan inflasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar dapat mencukupi kebutuhan serta menjadi respon yang tepat dalam menangani masalah inflasi yang ada.

6. Indikator Ketepatan

Penilaian indikator ketepatan dari Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Kota Denpasar Tahun 2024 dinyatakan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan meskipun program kegiatan penanganan inflasi telah dilaksanakan, masih ada masyarakat yang belum mengetahui adanya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan program-program yang dibuat baik itu masyarakat pedagang pasar maupun masyarakat pelanggan pasar.

7. Faktor Pendukung Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar.

Sinergi dan kerjasama antarinstansi seperti antara Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan dinas atau lembaga pengurus harian, tersedianya media mengenai transparansi laporan hasil kegiatan, perkembangan inflasi serta dan harga bahan pokok, kapasitas sumber daya manusia dalam tim serta kemitraan dengan sektor swasta, serta pihak kelurahan.

8. Faktor Penghambat Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar

Faktor penghambat Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar itu sendiri. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program seperti pasar murah, pertanian rumah tangga, atau gerakan penghematan konsumsi menjadi rendah. Terbatasnya penyebaran informasi kepada para pedagang, khususnya yang beraktivitas di pasar tradisional. Saluran komunikasi yang digunakan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

9. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Adapun beberapa rekomendasi peningkatan kinerja untuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar adalah memperkuat kerjasama antar instansi seperti dinas yang ada di lingkungan Kota Denpasar, Bank Indonesia, Bulog, dan pelaku distribusi. Selanjutnya adalah penghematan dan transparansi anggaran agar hemat, tepat guna, dan transparan. Terakhir yaitu peningkatan sistem pelayanan dan sistem informasi berbasis data atau online agar memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun keluhan mengenai harga pasar dan mengakses informasi lebih akurat mengenai harga bahan pokok serta informasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar itu sendiri.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dari Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar tahun 2024, maka adapun saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Kota Denpasar perlu melakukan peningkatan frekuensi pemantauan harga. Yang dimana hal tersebut dilakukabn secara lebih teratur dan tidak hanya pada waktu-waktu tertentu atau saat hari besar. Pertimbangkan untuk melibatkan pedagang dalam proses pemantauan agar mereka lebih memahami pentingnya transparansi harga.
2. Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Kota Denpasar perlu mengembangkan sosialisasi terkait program yang dimana meningkatkan upaya sosialisasi mengenai program-program pengendalian inflasi kepada masyarakat agar mereka lebih memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Kota Denpasar
3. Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Kota Denpasar perlu melakukan evaluasi kegiatan di setiap kelurahan yang dimana evaluasi dilakukan secara berkala terhadap kegiatan yang dilaksanakan di setiap kelurahan untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang setara dari program pengendalian inflasi.
4. Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Kota Denpasar perlu membuat media khusus untuk menjangkau umpan balik masyarakat. Diharapkan agar membuat wadah khusus untuk menyebarkan informasi terkait perkembangan program pengendalian inflasi di Kota Denpasar serta wadah komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau keluhan terkait program pengendalian inflasi. Hal ini dapat membantu Tim pengendali inflasi daerah (TPID) Kota Denpasar untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- babel.prov.go.id. (2022, Agustus 30). 10 Langkah Strategis Pemerintah Kendalikan Inflasi Daerah. Retrieved from Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: https://babelprov.go.id/siaran_pers/10-langkah-strategis-pemerintah-kendalikan-inflasi-daerah
- Denpasar, B. P. (2024, September 2). Inflasi Bulanan Kota Denpasar dan Nasional, 2023. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kota Denpasar: <https://denpasarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MSMy/inflasi-bulanan-kota-denpasar-dan-nasional.html>
- Ismail, M. (2020). Evaluating the Macroeconomic Impact of IMF Programs in Sudan. Discussion Paper No. 2020-21.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi tahun 2019.
- Pemuka, A. R. (2014). Analisis Pengaruh Program Pengentasan Kemiskinan Desa (PKD) Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Di Desa/Pekon Adiluh Kabupaten Pringsewu. skripsi, Universitas Lampung, Ekonomi Pembangunan, Bandar Lampung.
- Saefulloh, M. H., Fahlevi, M. R., & Centauri, S. A. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik , 22-23.
- SK Gubernur Bali No. 531/01-D/HK/2010 mengenai Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pemantauan Inflasi Daerah (TKPID) Provinsi Bali
- SK Nomor 188.45/887HK/2018 tanggal 26 Juni 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.
- Tim Pelaksana Kelompok Kerja Nasional TPID, (2014) Buku Petunjuk TPID
- Utara, S. I. (2014). Pembentukan TPID di Seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia Berdasarkan Instruksi Mendagri No. 027/1696/SJ. Retrieved from Si Harapanku: <http://hargapangan.sumutprov.go.id/pembentukan-tpid-di-seluruh-kabupatenkota-di-indonesia-berdasarkan-instruksi-mendagri-no-0271696sj>